



Krisis Pengungsi di Sudan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan Wilayah Perbatasan Chad

Andi Syakirah Nariswari^{1*}, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: ririssyakirah2525@gmail.com*

Abstract: *This paper discusses the impact of the Sudanese refugee crisis on security stability in the Chad border region. The conflict between the Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces since April 2023 has triggered a massive wave of refugees, making Chad one of the main recipient countries. Using a regional security complex theory approach, this paper shows that the flow of refugees not only creates social and economic pressures, but also magnifies security risks such as infiltration of armed groups, tensions between communities, and weak control in the border region. Through document analysis, the paper highlights how Chad's capacity constraints exacerbate the situation, as well as the need for a long-term response involving cross-actor coordination and sustained international support.*

Keyword: *Borders, Chad, Refugee Crisis, Security Stability, Sudan.*

Abstrak: Tulisan ini membahas dampak krisis pengungsi Sudan terhadap stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Chad. Konflik antara *Sudanese Armed Forces* dan *Rapid Support Forces* sejak April 2023 telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran, menjadikan Chad sebagai salah satu negara penerima utama. Dengan menggunakan pendekatan teori kompleks keamanan regional, tulisan ini menunjukkan bahwa arus pengungsi tidak hanya menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperbesar risiko keamanan seperti penyusupan kelompok bersenjata, ketegangan antar komunitas, dan lemahnya kontrol di wilayah perbatasan. Melalui analisis dokumen, tulisan ini menyoroti bagaimana keterbatasan kapasitas Chad memperparah situasi, serta perlunya respons jangka panjang yang melibatkan koordinasi lintas aktor dan dukungan internasional berkelanjutan.

Kata Kunci: Krisis Pengungsi, Sudan, Chad, Stabilitas Keamanan, Perbatasan.

1. LATAR BELAKANG

Krisis pengungsi yang dipicu oleh konflik bersenjata tidak hanya akan berdampak pada negara asalnya saja, tetapi juga dapat memberikan tekanan besar terhadap negara-negara tetangganya, terutama dalam hal stabilitas keamanan, sosial, dan ekonomi. Salah satu contoh nyata dari dinamika ini adalah pertikaian elit militer yang terjadi di Sudan sejak April 2023 antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF), yang memicu gelombang pengungsian massal ke wilayah perbatasan, termasuk Chad. Pertikaian bersenjata ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran dan mendorong jutaan warga sipil meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang lebih aman, termasuk ke Chad yang berbatasan langsung dengan Sudan.

Sudan bukanlah negara yang asing terhadap konflik. Sejak meraih kemerdekaan dari Inggris dan Mesir pada tahun 1956, negara ini telah mengalami rangkaian panjang ketidakstabilan politik, kudeta militer, serta perang saudara yang berkesinambungan (Putri, 2024). Konflik antara wilayah utara dan selatan selama beberapa dekade menewaskan ratusan ribu orang dan menimbulkan penderitaan massal akibat kelaparan dan penyakit. Ketegangan ini berpuncak pada Perang Saudara Sudan Kedua (1983–2005), yang kemudian mengantarkan pada pemisahan Sudan Selatan dan kemerdekaannya pada tahun 2011 (Momodu, 2018). Meskipun demikian, konflik internal di Sudan belum berakhir.

Setelah pemisahan tersebut, Sudan kembali menghadapi krisis politik, terutama pasca tergulingnya Omar al-Bashir pada 2019 setelah lebih dari tiga dekade berkuasa (Malafronte, 2020). Pemerintahan transisi sipil-militer yang dibentuk sebagai upaya menuju demokrasi justru digulingkan oleh militer melalui kudeta pada Oktober 2021, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (Sayigh, 2021). Kudeta ini membubarkan kabinet sipil dan memicu protes luas. Ketegangan antara SAF dan RSF pun meningkat, hingga akhirnya meletus menjadi konflik bersenjata terbuka pada April 2023. Ketidakstabilan ini tidak hanya memperburuk krisis kemanusiaan di Sudan, tetapi juga mendorong pengungsian besar-besaran penduduk sipil ke negara-negara tetangga.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Sudan, Chad telah lama menjadi tujuan utama pengungsi yang melarikan diri dari konflik. Sejak pecahnya krisis di Darfur pada awal 2000-an, wilayah perbatasan Sudan–Chad menjadi pusat ketegangan akibat konflik bersenjata, pemberontakan, dan arus pengungsian massal yang terus berlangsung. Chad kini menampung ratusan ribu pengungsi Sudan, banyak di antaranya telah tinggal selama lebih dari satu dekade (Nguyen & et.al, 2021, p. 14).

Berdasarkan data terbaru tahun 2025 dari *UN High Commissioner for Refugees* (UNHCR), saat ini, Chad telah mencatat lebih dari 700.000 pengungsi baru dari Sudan, dengan 87% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 32 titik perbatasan di provinsi timur Chad, kini menjadi jalur utama masuknya pengungsi Sudan dan warga Chad yang kembali ke negaranya, sehingga menambah tekanan pada kapasitas negara dalam menangani krisis ini. Pemerintah Chad bahkan memperkirakan bahwa jumlah pengungsi dan warga yang kembali bisa mencapai 973.000 orang pada akhir 2025, yang semakin memperburuk tantangan yang dihadapi negara dalam mengelola situasi ini (UNHCR, 2025, p. 1). Meskipun pemerintah Chad, dengan dukungan organisasi internasional seperti *UN High Commissioner for Refugees* (UNHCR), terus berupaya

menyediakan bantuan kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi pengungsi, skala dari krisis gelombang pengungsi ini terus berkembang sehingga menimbulkan berbagai ancaman baik bagi pengungsi Sudan yang masuk maupun warga lokal negara Chad.

Melihat kompleksitas tersebut, tulisan ini berupaya untuk melihat bagaimana arus pengungsi Sudan benar-benar memengaruhi stabilitas Chad, khususnya pada aspek keamanan. Selama ini, fokus kajian lebih banyak tertuju pada upaya tanggapan darurat atau bantuan yang diberikan oleh aktor internasional, sementara dampak lanjutan terutama di wilayah perbatasan yang rentan ini belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan menyoroti dinamika tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi Chad serta membantu memahami arah penyelesaian kedepannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Untuk memahami krisis pengungsi di Sudan dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Chad, pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini berlandaskan pada teori kompleks keamanan regional. Teori ini memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana dinamika keamanan antarnegara di kawasan yang saling berdekatan dapat saling memengaruhi, serta bagaimana ancaman di satu negara dapat berdampak langsung pada stabilitas negara lain di sekitarnya. Dengan demikian, teori ini membantu melihat persoalan pengungsi dan keamanan tidak hanya sebagai isu domestik, tetapi sebagai bagian dari pola interaksi kawasan yang lebih luas.

Teori Regional Security Complex

Teori *Regional Security Complex* (RSC) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver menawarkan pendekatan untuk memahami dinamika keamanan internasional dengan melihat bagaimana isu-isu keamanan cenderung terstruktur dalam lingkup kawasan. Barry Buzan dan Ole Wæver menyatakan bahwa negara-negara yang letaknya berdekatan biasanya memiliki keterkaitan yang kuat dalam hal ancaman dan kepentingan keamanan. Ancaman terhadap satu negara di kawasan tersebut sering kali berdampak langsung terhadap negara tetangganya, karena adanya hubungan sejarah, politik, dan geografis yang saling memengaruhi. Ketika pola saling ketergantungan ini muncul secara konsisten, terbentuklah apa yang disebut sebagai kompleks keamanan regional. Dalam konteks ini, interaksi keamanan antarnegara di dalam kawasan jauh lebih intens dibandingkan dengan interaksi mereka dengan negara-negara di luar kawasan

(Barry & Ole, 2003, pp. 44-47) Teori ini menunjukkan bahwa untuk memahami keamanan sebuah negara, kita juga harus melihat situasi keamanan kawasan di sekitarnya.

Kompleks keamanan regional disebut “kompleks” karena interaksi antarnegara dalam kawasan tersebut membentuk suatu pola yang saling terikat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Buzan dan Wæver menyebut bahwa keamanan dalam satu negara “saling berkaitan dengan negara-negara tetangganya” karena adanya ketergantungan timbal balik yang tinggi terhadap ancaman dan respons keamanan di dalam kawasan (Barry & Ole, 2003, p. 44). Dalam struktur ini, negara-negara saling memengaruhi baik secara langsung melalui konflik maupun secara tidak langsung melalui dinamika sosial-politik yang menyebar lintas batas. Contohnya dapat dilihat pada kawasan Afrika, termasuk wilayah perbatasan Chad, di mana konflik yang terjadi di negara tetangga seperti Sudan tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berdampak langsung terhadap situasi keamanan Chad. Ancaman yang melintas batas seperti pengungsian massal, masuknya kelompok bersenjata, atau ketegangan etnis menunjukkan bagaimana sebuah konflik lokal dapat menjadi bagian dari ketegangan regional yang saling terhubung, itulah yang menjadikan kawasan ini sebagai bagian dari kompleks keamanan regional (Barry & Ole, 2003, pp. 381-382).

Teori ini turut diperkuat oleh Amitav Acharya yang menekankan bahwa pendekatan kompleks keamanan regional memberikan perspektif yang mampu membantu memahami bagaimana negara-negara dalam satu kawasan saling terhubung satu sama lain dalam menghadapi ancaman keamanan. Ia menjelaskan bahwa kompleks keamanan regional terbentuk bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga melalui proses sosial, historis, dan institusional yang menciptakan pola saling ketergantungan antarnegara di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, stabilitas atau konflik yang terjadi di satu negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika keamanan di negara tetangganya. Menurut Acharya, *regional security complexes* terbentuk ketika negara-negara dalam suatu wilayah saling terkait erat sehingga keamanan satu negara tidak dapat dipisahkan dari yang lain, dan hubungan ini membentuk struktur keamanan yang khas dalam wilayah tersebut (Amitav, 2007, pp. 631-632). Karena itu, untuk memahami situasi keamanan suatu negara, teori ini hadir untuk memberikan perspektif tentang bagaimana keterkaitan wilayah dapat mempengaruhi perkembangan keamanan kawasan disekitarnya. Pendekatan ini relevan digunakan untuk melihat situasi antara Sudan dan Chad karena perpindahan pengungsi tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga dapat membawa dampak sosial dan keamanan di negara tetangga. Dalam hal ini, teori kompleks keamanan regional

membantu menjelaskan bagaimana persoalan di satu negara dapat memengaruhi kondisi negara lain di sekitarnya, apalagi jika negara-negara tersebut saling terhubung secara geografis dan politik. Oleh karena itu, pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana satu konflik bisa meluas menjadi ancaman ke tingkat kawasan, terutama ketika melibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan tekanan lintas batas lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen. Sumber data yang dianalisis mencakup penelitian-penelitian sebelumnya, laporan lembaga internasional seperti UNHCR, serta dokumen kebijakan dan laporan resmi yang membahas dinamika konflik di Sudan dan situasi pengungsi di Chad. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana arus pengungsi dari Sudan memengaruhi stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Chad, termasuk bentuk-bentuk tantangan yang muncul seperti tekanan terhadap sumber daya, ketegangan sosial, dan potensi gangguan keamanan. Tulisan ini juga menyoroti bagaimana perbatasan Chad menjadi titik rawan yang dipengaruhi langsung oleh konflik internal Sudan, serta bagaimana krisis ini berdampak pada keamanan kawasan secara lebih luas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis yang bermula dari konflik bersenjata di Sudan tidak berhenti pada batas wilayahnya sendiri. Gelombang pengungsian besar-besaran yang melintasi perbatasan membawa dampak nyata bagi Chad, khususnya di daerah-daerah yang langsung berbatasan. Bagian ini akan mengurai bagaimana arus pengungsi tersebut menimbulkan tekanan baru di tengah kondisi Chad yang juga memiliki keterbatasan, mulai dari aspek sosial dan ekonomi hingga munculnya potensi ancaman terhadap stabilitas keamanannya.

Dinamika Arus Pengungsi Sudan dan Beban Sosial Ekonomi di Chad

Konflik bersenjata yang meletus pada 15 April 2023 antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Forces* (RSF) menandai eskalasi besar dalam ketegangan politik dan militer di Sudan. Ketegangan ini bermula dari persaingan internal antara dua kekuatan utama pasca kejatuhan rezim Omar al-Bashir dan kegagalan upaya transisi menuju pemerintahan sipil. SAF yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF di bawah Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) berselisih tajam soal restrukturisasi militer, terutama integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata nasional Sudan. Ketika

proses integrasi ini gagal, konflik kemudian berubah menjadi pertempuran terbuka yang menjalar cepat dari ibu kota Khartoum ke wilayah Darfur, Kordofan, dan bagian tengah negara Sudan (Kidane, 2024, pp. 3-4). Akibatnya, Infrastruktur hancur, rumah sakit lumpuh, dan layanan publik berhenti total. Warga sipil menjadi korban, menyebabkan mereka menjadi kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam situasi ini, kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti penjarahan dan kekerasan seksual, turut dilaporkan meluas di berbagai wilayah yang dikuasai oleh kedua pihak yang bertikai.

Kondisi ini mendorong jutaan warga Sudan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Sepanjang 2024 hingga awal 2025, UNHCR mencatat bahwa lebih dari 11,3 juta orang mengungsi akibat konflik, dengan sekitar delapan juta di antaranya menjadi pengungsi internal yang tersebar di wilayah-wilayah konflik seperti Khartoum, Darfur, dan Kordofan. Sementara itu, sekitar tiga juta lainnya melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Ethiopia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, dan Chad (UNHCR, 2025, p. 2). Arus pengungsian ini tidak hanya disebabkan oleh kekerasan bersenjata, tetapi juga oleh kelaparan yang meningkat tajam, runtuhnya sistem kesehatan, dan penyebaran penyakit menular. Hingga awal 2025, sekitar 25 juta jiwa yaitu hampir separuh populasi Sudan dilaporkan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup (UNHCR, 2025, p. 2). Wabah kolera, malaria, dan diare akut merebak di wilayah pengungsian dalam negeri, memperburuk krisis yang sudah rumit.

Dari seluruh negara tujuan para pengungsi dari Sudan, Chad menjadi salah satu negara yang paling terdampak secara langsung. Letaknya yang berbatasan langsung dengan zona konflik menjadikan wilayah timur Chad sebagai jalur masuk utama. Pengungsi Sudan masuk melalui lebih dari 32 titik lintas batas, terutama di provinsi Ouaddaï, Sila, Wadi Fira, dan Ennedi Est, yang kini menampung sebagian besar populasi pengungsi dari Sudan. Hingga April 2025, Chad telah menerima lebih dari 700 ribu pengungsi baru, dengan profil demografis yang sangat rentan, dimana 87 persennya adalah perempuan dan anak-anak, dan sebagian besar dari mereka tiba dalam kondisi kesehatan yang buruk dan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar (UNHCR, 2025, p. 1). Sebagian besar pengungsi ini menetap di kamp-kamp darurat, sementara lainnya tinggal di sekitar komunitas lokal yang sudah lemah secara sosial dan ekonomi. Mereka menghadapi tantangan berat mulai dari kurangnya akses terbatas terhadap air bersih, fasilitas kesehatan yang minim, serta distribusi pangan yang belum mampu menjangkau semua pengungsi secara merata.

Lebih jauh lagi, laporan *Refugees in Chad: The Road Forward* mencatat bahwa sebagian besar rumah tangga pengungsi dikepalai oleh perempuan dan memiliki rata-rata anggota keluarga yang besar, sementara hampir separuh populasi pengungsi berusia di bawah 15 tahun (Nguyen & et.al, 2021, pp. 16-17). Dalam laporan tersebut juga menyoroti bahwa banyak pengungsi dari Sudan telah tinggal di Chad selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa krisis yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi menjadi situasi jangka panjang yang membutuhkan penanganan yang lebih serius. Meski sekitar 91 persen pengungsi menerima bantuan pangan, laporan yang sama menunjukkan bahwa hampir separuh dari mereka masih mengalami kekurangan gizi (Nguyen & et.al, 2021, p. 24). Ketimpangan dalam distribusi bantuan, minimnya fasilitas pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dapat memperburuk kondisi yang sudah rentan. Tekanan demografis dan ekonomi ini membuat Chad harus menanggung beban yang sangat besar, di tengah kapasitas nasional yang terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dukungan internasional.

Lonjakan populasi pengungsi dari Sudan ke Chad dalam beberapa kasus bahkan melampaui jumlah penduduk lokalnya, seperti yang terjadi di Ouaddaï dan Sila. Hal ini berdampak langsung pada akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Bahkan, rata-rata ketersediaan air di beberapa kamp hanya mencapai 6 liter per orang per hari, jauh di bawah standar minimum kemanusiaan yang ditetapkan WHO (International Crisis Group, 2024, p. 10). Ketimpangan ini sering kali memicu ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal. Di Métié, misalnya, bentrokan sempat terjadi akibat persaingan dalam pengambilan kayu bakar dan air, yang dianggap warga setempat sebagai milik komunitas mereka (International Crisis Group, 2024, p. 12). Laporan dari *International Crisis Group* juga mencatat bahwa ketegangan juga muncul terkait akses terhadap lahan pertanian. Sebagian warga lokal kehilangan lahan akibat pembangunan kamp pengungsian, namun tidak mendapat kompensasi yang adil, sementara para pengungsi yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki akses terhadap tanah untuk bercocok tanam. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis pengungsi tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga mulai menimbulkan gesekan sosial yang bisa berkembang menjadi sumber ketidakstabilan jika tidak ditangani secara efektif.

Tekanan ekonomi yang ditimbulkan pun tidak kalah signifikan. Di kota-kota seperti Abéché, peningkatan jumlah penduduk secara drastis menyebabkan harga sewa tempat tinggal melonjak hampir dua kali lipat. Harga bahan pangan, air minum, dan bahan bakar juga naik tajam karena gangguan jalur logistik dari Sudan dan tingginya

ketergantungan pada pasokan dari N'Djamena dan Libya (International Crisis Group, 2024, pp. 10-11). Namun, respons kemanusiaan belum mampu mengimbangi skala krisis. Hingga September 2024, hanya sekitar 35 persen dari total kebutuhan bantuan yang berhasil didanai oleh komunitas internasional, membuat sebagian besar pengungsi hanya menerima bantuan pangan cukup untuk dua hingga tiga minggu per bulan. Fasilitas kesehatan pun tak luput dari tekanan, dengan rasio satu dokter untuk setiap 38.000 orang, yang membuat layanan medis tidak mampu menjawab lonjakan permintaan di tengah situasi rentan wabah penyakit (ACAPS, 2023, p. 2). Di tengah kompleksitas ini, jelas bahwa beban yang ditanggung Chad bukan semata dalam bentuk angka, tetapi telah bertransformasi menjadi krisis multidimensi yang menyentuh berbagai aspek sekaligus.

Pengaruh Arus Pengungsi terhadap Stabilitas Keamanan Wilayah Perbatasan

Beban Chad dalam menampung pengungsi bukan hanya soal ekonomi dan sosial, melainkan juga menyangkut persoalan yang lebih serius, yakni keamanan. Masuknya ratusan ribu pengungsi ke wilayah yang sejak awal memiliki kapasitas keamanan terbatas telah memunculkan risiko baru, termasuk potensi penyusupan kelompok bersenjata, penyelundupan senjata, dan konflik antar komunitas. Provinsi-provinsi seperti Ouaddaï, Sila, dan Wadi Fira menjadi titik utama pengungsi sekaligus lokasi yang rentan terhadap ketegangan sosial-politik, mengingat kehadiran kelompok bersenjata dari Darfur yang diperkirakan menyusup bersama arus pengungsian (ACAPS, 2023, p. 2). Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya indikasi bahwa wilayah perbatasan digunakan sebagai jalur logistik oleh faksi-faksi bersenjata dari Sudan, yang memanfaatkan situasi tidak stabil untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Chad (Enrica, 2024). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis kemanusiaan dapat dengan mudah bergeser menjadi persoalan keamanan, terutama jika tidak ada sistem deteksi dan kontrol perbatasan yang memadai.

Di sisi lain, lonjakan jumlah penduduk akibat pengungsian dalam skala besar ikut memicu potensi konflik antara pengungsi dan warga lokal. Persaingan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya seperti air bersih, lahan, dan bantuan kemanusiaan menciptakan situasi yang rawan, terlebih di wilayah-wilayah yang sejak lama sudah menghadapi ketimpangan pembangunan. Ketika pengungsi dinilai mendapat perhatian dan dukungan lebih dari lembaga-lembaga kemanusiaan, sementara warga lokal juga hidup dalam kondisi serba terbatas, perasaan iri dan ketegangan sosial pun sulit dihindari. Ketiadaan kapasitas aparat keamanan untuk mengawasi dan merespons dinamika ini

secara memadai berisiko mendorong gesekan tersebut berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Sebagai contoh, beberapa kelompok milisi dari Darfur dilaporkan menyusup bersama gelombang pengungsi dan mendirikan posisi tersembunyi di dekat kamp-kamp pengungsian, khususnya di sekitar Adré dan Am-Dam (Enrica, 2024). Mereka tidak hanya membawa risiko kekerasan bersenjata, tetapi juga memperkuat jalur penyelundupan senjata dan amunisi dari Sudan ke Chad. Pemerintah Chad sendiri mengakui kesulitan dalam memantau pergerakan ini karena lemahnya kontrol di sepanjang perbatasan timur yang terbentang lebih dari 1.000 km dengan kondisi geografis terbuka dan minim pos pengamanan (ACAPS, 2023, p. 2). Laporan *Crisis Group* pun menyebutkan bahwa di beberapa daerah perbatasan, terdapat kurang dari 20 personel militer aktif yang bertugas mengawasi ribuan pengungsi dan wilayah yang luas. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya logistik, kendaraan operasional, serta koordinasi antara aparat lokal dan otoritas pusat. Akibatnya, Chad menghadapi risiko peningkatan kehadiran kelompok-kelompok bersenjata di wilayahnya, serta meluasnya konflik skala kecil yang dapat memburuk sewaktu-waktu. Dalam satu kasus yang dilaporkan pada akhir 2023, terjadi baku tembak antara milisi dari Darfur dan pasukan Chad di wilayah perbatasan Adré, yang menewaskan beberapa warga sipil dan memperlihatkan betapa tipisnya garis batas antara krisis kemanusiaan dan kekacauan bersenjata (Enrica, 2024).

Lebih jauh lagi, laporan dari *Médecins Sans Frontières* (MSF) menunjukkan bahwa risiko keamanan di wilayah perbatasan Chad tidak lagi bersifat potensial, melainkan sudah nyata terjadi di lapangan. Pada November 2023, kamp Wadigaldagalda, yang hanya berjarak lima kilometer dari perbatasan, diserang oleh pelaku bersenjata yang mencuri ternak, membakar tempat tinggal, dan menculik warga sipil serangan ini menyebabkan ribuan pengungsi terpaksa mengungsi kembali ke lokasi lain di Chad yang belum tentu lebih aman (Médecins Sans Frontières, 2024, p. 7). Sebelumnya, pada September 2023, serangan serupa juga terjadi di wilayah sekitar Andressa dan Mogororo, yang menyebabkan trauma mendalam bagi para penyintas, termasuk perempuan kepala keluarga dan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan fisik maupun hukum. Para pengungsi melaporkan bahwa mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus karena berada di wilayah terbuka tanpa pagar pelindung, pengawasan aparat, atau penerangan malam hari. Ketiadaan sistem perlindungan minimum di kamp-kamp tersebut memperkuat fakta bahwa kawasan ini tidak hanya rentan secara kemanusiaan, tetapi juga terbuka terhadap infiltrasi dan kekerasan, memperjelas bagaimana krisis pengungsi telah melewati batas isu

kemanusiaan dan menjadi persoalan keamanan langsung di perbatasan Chad (Médecins Sans Frontières, 2024, pp. 6-7).

Dalam konteks inilah, pendekatan *Regional Security Complex Theory* menjadi relevan, teori ini menunjukkan bagaimana krisis yang berawal dari Sudan tidak lagi dapat dipahami sebagai isu domestik semata, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika ancaman regional yang saling terhubung dan memengaruhi keamanan Chad secara langsung. Melihat kompleksitas ini, menjadi jelas bahwa dampak dari krisis pengungsi tidak berhenti pada persoalan kemanusiaan dan sosial, tetapi juga memperlihatkan tanda-tanda munculnya ancaman keamanan yang bisa menjadi serius. Ketika kapasitas negara Chad untuk mengelola arus pengungsi dan menjaga stabilitas sosial terdesak, celah-celah keamanan mulai terbuka lebar. Wilayah perbatasan yang minim penjagaan menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor bersenjata non-negara dan jaringan kriminal lintas batas. Ini memperkuat argumen penulis bahwa stabilitas kawasan bergantung pada dinamika keamanan negara-negara tetangga. Sebagaimana ditekankan dalam kerangka *Regional Security Complex Theory*, ancaman di satu negara tidak bisa lagi dipisahkan dari keamanan negara lain dalam satu kawasan, karena keterhubungan geografis dan konflik yang saling menyebar lintas batas.

Respons Pemerintah Chad terhadap Krisis Pengungsi dan Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan

Dalam menghadapi krisis pengungsi yang semakin kompleks ini, pemerintah Chad kemudian dihadapkan pada dilema besar, antara mempertahankan kebijakan terbuka terhadap pengungsi atau mengambil tindakan terhadap pengungsi yang menimbulkan peningkatan ancaman yang semakin meluas. Selama dua dekade terakhir pemerintah Chad berusaha mempertahankan kebijakan pintu terbuka yang menjadi landasan respons mereka dalam mengambil tindakan menghadapi krisis pengungsi Sudan. Negara ini telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta Konvensi OAU 1969, dan menjadi satu dari sedikit negara di kawasan yang menyediakan akses hukum dan kebijakan domestik yang relatif progresif bagi pengungsi. Pada tahun 2020, Chad mengesahkan *National Asylum Law* yang memperkuat hak pengungsi atas kebebasan bergerak, pendidikan, pekerjaan formal, dan layanan kesehatan dalam sistem nasional (UNHCR, 2024, p. 2). Kebijakan ini semakin ditegaskan dalam *Global Refugee Forum* dan *Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF)* yang mendorong integrasi pengungsi ke dalam masyarakat lokal melalui pendekatan

inklusif dan pembangunan jangka panjang. Namun di balik komitmen normatif ini, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara prinsip dan praktik.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Chad adalah keterbatasan kapasitas negara dalam mengelola krisis yang begitu besar dan kompleks. Lembaga utama yang menangani isu pengungsi di tingkat nasional, yaitu *Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés* (CNARR), masih sangat bergantung pada dukungan teknis dan logistik dari UNHCR dan mitra internasional. Berbagai program integrasi seperti *villagization* yang bertujuan mengubah kamp pengungsi menjadi desa permanen dengan fasilitas dasar, sering kali terhambat akibat kurangnya pendanaan dan kapasitas teknis, serta belum meratanya koordinasi antara otoritas pusat, pemerintah lokal, dan organisasi non-pemerintah (UNHCR, 2024, pp. 3-4). Dalam situasi ini, implementasi yang dijanjikan oleh kebijakan nasional menjadi sulit diwujudkan, terutama ketika pemerintah harus mengalokasikan sumber daya terbatasnya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terus membesar.

Situasi yang dihadapi Chad hari ini memperlihatkan jurang yang lebar antara prinsip perlindungan pengungsi yang dijanjikan dalam kebijakan nasional dan kenyataan politik serta keamanan di lapangan. Di satu sisi, Chad berkomitmen kuat terhadap norma-norma internasional dan membuka ruang bagi pengungsi untuk berintegrasi ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi lokal. Namun di sisi lain, tekanan yang dihasilkan oleh gelombang pengungsian yang terus bertambah telah menggerus kapasitas negara untuk menjalankan komitmen tersebut secara efektif. Ketika infrastruktur lemah, sistem keamanan rapuh, dan dukungan internasional tidak mencukupi, maka nilai-nilai perlindungan yang ideal sulit untuk menjadi nyata. Dalam konteks ini, tidak mungkin membicarakan stabilitas wilayah perbatasan Chad sebagai urusan internal semata. Gejala yang bermula dari Sudan kini berembes hingga ke jantung keamanan nasional Chad menunjukkan bahwa ancaman yang bersifat lintas batas tidak bisa ditangani secara sepihak.

Dari berbagai dinamika yang terjadi inilah sebenarnya kita sudah bisa mulai melihat dan memahami lebih spesifiknya bagaimana sebenarnya stabilitas itu terganggu. Seperti yang kita sudah pahami sejauh ini bahwa ketika Chad menerima ratusan ribu pengungsi tanpa kesiapan administratif dan pertahanan yang memadai, maka fondasi-fondasi tersebut mulai goyah. Mulai dari terjadinya berbagai konflik-konflik sosial yang berskala kecil hingga ancaman yang lebih serius. Stabilitas sangat ditentukan oleh kemampuan negara hadir secara nyata dalam menjaga keamanan teritorialnya. Salah satu

tolak ukur yang bisa menekankan hal ini adalah sejauh mana negara mampu mengendalikan wilayah perbatasannya dari ancaman-ancaman kelompok bersenjata non-negara. Namun, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, dalam kasus Chad sudah banyak kasus serangan di kamp-kamp dan daerah perbatasan. Ini mencerminkan lemahnya proteksi negara Chad atas warga sipil. Dengan personel militer yang sangat terbatas dan logistik yang tidak memadai, Chad menghadapi kekosongan kekuasaan di titik-titik rawan yang seharusnya menjadi prioritas pengamanan. Ketidakhadiran negara ini bukan hanya memperbesar risiko kekerasan, tetapi juga membuka ruang bagi aktor non-negara untuk memperluas pengaruhnya. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa lagi memandang krisis pengungsi hanya sebagai permasalahan kemanusiaan atau beban sosial semata. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu keamanan nasional. Ketika negara tidak mampu hadir secara efektif untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan mengendalikan wilayah teritorinya, maka ruang untuk munculnya kelompok bersenjata atau jaringan penyelundupan, akan semakin membesar. Dengan demikian, kompleksitas dampak pengungsi terhadap keamanan Chad memperjelas bahwa krisis ini telah melampaui skala kemanusiaan biasa dan masuk ke ranah stabilitas Negara.

Berangkat dari situasi ini maka Chad perlu mulai menggeser fokus dari penanganan darurat menuju langkah-langkah jangka panjang yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ini bukan cuma soal menerima lebih banyak pengungsi, tapi bagaimana caranya agar negara tetap bisa berdiri stabil di tengah tekanan yang besar. Pemerintah harus mulai memperkuat kehadirannya di wilayah-wilayah yang rawan, terutama di perbatasan, dengan memastikan layanan dasar seperti air, kesehatan, dan pengamanan bisa benar-benar dirasakan. Di sisi lain, dukungan dari komunitas internasional juga harus lebih dari sekadar bantuan sesaat, Chad butuh pendampingan jangka panjang, baik dari segi pendanaan, tenaga ahli, maupun kebijakan yang mendukung integrasi pengungsi secara manusiawi. Selama negara belum benar-benar hadir di lapangan, maka krisis ini akan terus jadi beban, dan stabilitas yang diharapkan sulit tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Krisis pengungsi yang dipicu oleh konflik bersenjata di Sudan telah memberikan dampak serius terhadap stabilitas wilayah perbatasan Chad, tidak hanya dari sisi kemanusiaan tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa masuknya ratusan ribu pengungsi ke Chad telah memperberat beban negara, terutama di wilayah timur yang sejak awal telah memiliki

kapasitas infrastruktur dan keamanan yang terbatas. Ketegangan sosial akibat persaingan sumber daya, meningkatnya potensi konflik antar komunitas, serta indikasi penyusupan kelompok bersenjata non-negara semakin menegaskan bahwa krisis ini bukan sekadar permasalahan pengungsian, melainkan bagian dari ancaman regional. Hal ini menunjukkan bagaimana konflik yang terjadi di satu negara, dalam kasus ini yaitu Sudan, dapat menjalar dan secara langsung memengaruhi keamanan negara tetangganya yaitu Chad.

Melihat kenyataan di lapangan, disarankan agar Pemerintah Chad tidak hanya berfokus pada penanganan darurat jangka pendek, tetapi mulai mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pengamanan wilayah perbatasan, penyediaan layanan dasar yang lebih merata bagi pengungsi dan warga lokal, serta penguatan kelembagaan nasional menjadi langkah penting yang perlu segera diambil. Selain itu, dukungan dari komunitas internasional perlu diarahkan pada upaya yang lebih inklusif, termasuk pendanaan jangka panjang, peningkatan kapasitas teknis, dan kebijakan integratif yang mampu mengurangi ketegangan serta meningkatkan resiliensi negara penerima. Tulisan ini menyadari adanya keterbatasan dalam pengumpulan data primer di lapangan, sehingga riset lanjutan di masa depan disarankan untuk lebih mendalami peran aktor lokal dan respons masyarakat setempat terhadap krisis ini sebagai bagian penting dari dinamika keamanan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACAPS. (2023). *Chad: Influx of refugees from Sudan*. ACAPS.
- Barry, B., & Ole, W. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- International Crisis Group. (2024). *Chad: Limiting the impact of the war in Sudan on Ouaddaï*. International Crisis Group.
- Médecins Sans Frontières. (2024). *Chad's invisible and silent refugees*. Médecins Sans Frontières.
- Nguyen, N. T., et al. (2021). *Refugees in Chad: The road forward*. World Bank.
- UNHCR. (2025). *Emergency situation in Chad: Update on arrivals from Sudan as of 27 April 2025*. UNHCR.
- UNHCR. (2025). *Sudan situation overview – Global appeal 2025*. UNHCR.
- Amitav, A. (2007, July). The emerging regional architecture of world. *World Politics*, 59(4), 629–652.

- Momodu, S. (2018, December 23). Second Sudanese Civil War (1983–2005). *BlackPast*. Retrieved April 2025, from <https://www.blackpast.org/global-african-history/second-sudanese-civil-war-1983-2005/>
- Malafronte, G. (2020, February 18). Sudan after Omar al-Bashir's overthrow. *The Political Studies Association*. Retrieved April 2025, from <https://www.psa.ac.uk/psa/news/sudan-after-omar-al-bashir%E2%80%99s-overthrow>
- Sayigh, Y. (2021, October 25). The military has taken power in Sudan and dissolved its transitional government. *Carnegie Endowment for International Peace*. Retrieved April 2025, from <https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2021/10/the-military-has-taken-power-in-sudan-and-dissolved-its-transitional-government?lang=en>
- UNHCR. (2024, September). *Chad: Refugee policy review framework baseline as at 30 June 2020*. Retrieved May 28, 2025, from <https://reporting.unhcr.org/chad-refugee-policy-review>
- Kidane, K. (2024, October 12). The ongoing war in Sudan and its implications for the security and stability of the Horn of Africa and beyond. *Policy Center for the New South*. Retrieved May 27, 2025, from <https://www.policycenter.ma/publications/ongoing-war-sudan-and-its-implications-security-and-stability-horn-africa-and-beyond>
- Putri, A. (2024, December). Bantuan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Sudan: Dampak dari upaya perlindungan dan dukungan bagi pengungsi. *ResearchGate*. Retrieved May 2025, from <https://www.researchgate.net/publication/387056416>
- Enrica, P. (2024, December 12). The fallout in Chad from the fighting in Darfur. *International Crisis Group*. Retrieved May 28, 2025, from <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/fallout-chad-fighting-darfur>